

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori keagenan (*Agency theory*) dalam penelitian ini adalah sebagai grand theory. Teori yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) ini mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen pembuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan prinsipal (Ichsan, 2013).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini memberikan pertanggungjawabannya melalui penyajian laporan keuangan, mengungkapkan segala informasi dalam laporan keuangan dan memberikan akses informasi mengenai laporan keuangannya kepada publik atau pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penyajian laporan keuangan adalah penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin baik penyajian laporan keuangan, akan semakin jelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan haruslah akurat, relevan dan andal untuk menciptakan akuntabilitas keuangan yang dapat digambarkan melalui transparansi yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah (Nordiawan, 2010:73).

Tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah keseluruhan informasi yang diungkapkan secara rinci yang jelas dan ada didalam laporan keuangan. Pengungkapan atas informasi didalam laporan keuangan merupakan suatu elemen dari transparansi fiskal dan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan yang merupakan hal penting didalam organisasi sektor publik (Diamond, 2007). Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan pengungkapan informasi yang diperlukan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik

atas informasi keuangan pemerintah.dengan adanya transparansi atas informasi keuangan pemerintah hal ini bisa mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah. Semakin baik akses maka akan semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2009).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh variabel Penyajian, Tingkat Pengungkapan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah telah banyak diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 menunjukkan hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Sukhemi (2010)	X: Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Y: Akuntabilitas Keuangan Daerah.	Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.
2.	Frans (2011)	X: Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Y: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasandutan, dan Kabupaten Samosir.	Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan.
3.	Nur Azizah (2012)	X: Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4.	Yuni Sastra (2013)	X: Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Y: Akuntabilitas Keuangan Daerah Kota Medan.	Variabel Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.	Peggy Sande (2013)	X: Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Y:	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan terhadap

No	Penulis & Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
		Akuntabilitas Keuangan Daerah.	akuntabilitas keuangan daerah.
6.	Putu Sri Wahyuni (2014)	X: Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Y: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
7.	Sumiyati (2015)	X: Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Y: Akuntabilitas Keuangan Daerah.	Variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara individu maupun bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.
8.	Wahida (2015)	X: Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Y: Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.	Variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitass Keuangan Daerah.
9.	Nurlaili (2016)	X : Penyajian Laporan Keuangan, Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Y : Akuntabilitas Keuangan Daerah	Variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.
10.	Firstcilia Eldy Putri (2017)	X : Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan Y : Akuntabilitas keuangan Daerah	Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan memenuhi karakteristik kualitatif dalam penyajian laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan semakin jelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi utuh dalam laporan keuangan haruslah akurat, relevan dan andal untuk menciptakan akuntabilitas keuangan yang digambarkan melalui transparansi yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah (Nordiawan, 2010). Sejalan dengan teori keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai pihak pemegang amanah (*agent*) berkewajiban untuk menyajikan informasinya melalui laporan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan laporan keuangan sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) untuk mendapatkan informasi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

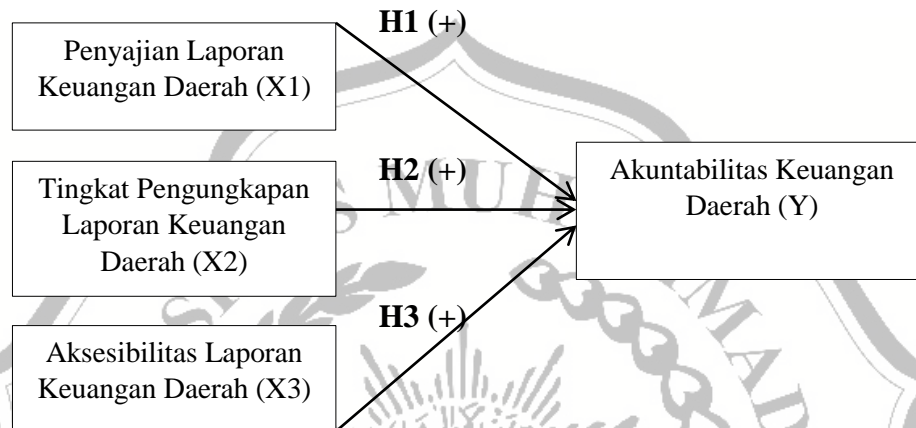
Selain melalui penyajian laporan keuangan, untuk menciptakan akuntabilitas juga didasarkan pada pengungkapan laporan keuangan yaitu informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan daerah. Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan adalah keseluruhan informasi yang diungkapkan secara rinci yang jelas dan ada didalam laporan keuangan. Seluruh kejadian, analisis manajemen dan informasi tambahan diluar biaya historis yang dapat memberikan pertimbangan untuk mengungkapkan

informasi secara jelas harus dipaparkan dalam laporan keuangan. Tujuan pengungkapan informasi yang diperlukan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Dengan adanya transparansi atas informasi keuangan pemerintah hal ini bisa membantu mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada aksesibilitas publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami karena laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Bila dalam penyajian laporan keuangan tidak memberikan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Menurut Mulyono (2006), ketidakmampuan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak hanya disebabkan karena laporan keuangan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna potensial tetapi juga disebabkan karena laporan keuangan tidak secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Karena laporan keuangan yang tidak aksesibel dapat menurunkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Sejalan dengan teori keagenan, pemerintah sebagai (*agent*) pihak yang diberikan amanah oleh (*principal*) pihak pemberi amanah atau masyarakat

harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan yang telah memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk mengelola dana publik.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Nordiawan (2011), semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas.

Diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sande (2013) yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Wahyuni (2014) penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sastra (2013) menyatakan Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

2. Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) nomor 04 tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan pengungkapan informasi yang diperlukan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. dengan adanya transparansi atas informasi keuangan pemerintah hal ini bisa membantu mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah..

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Putri (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dharmaningtyas (2017)

menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan aspek kecukupan pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 :Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sande, 2013). Dan dengan tersedianya aksesibilitas laporan keuangan maka akan menciptakan transparansi atas pengelolaan keuangan daerah dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas.

Diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu dari Wahyuni (2014) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Nurlaili (2016) aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sande (2013)

menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H3 :Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

